**PERWALIAN PENGURUSAN HARTA WARISAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT
HUKUM PERDATA (STUDI KASUS DI KELURAHAN KANDIS KOTA
KECAMATAN SIMPANG BELUTU KABUPATEN SIAK)**

Oleh : Alisa Kamal

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, SH, M.Kn

Pembimbing II : Ulfia Hasanah, SH, M.Kn

Alamat: Jl. Soekarno Hatta, Kel. Labuh Barat, Kec. Payung Sekaki

Email : alisakamal92@yahoo.co.id / Telepon : 0821-8357-8019

ABSTRACT

If one of the parents dies, the guardianship of children who are immature by law is held by the parent who lives the longest, if one of the husband or wife dies, the husband or wife who lives the longest along with their offspring who are heirs. from the inheritance. If the minor is possessed by the inheritance of the inheritor, the parent who lives the longest is the guardian of the child regarding the care of the child and his assets. In this case related to guardianship issues that occur in Kelurahan Kandis Kota. The purpose of writing this thesis is, first, to find out whether guardianship based on Article 345 KHUPerdata in Kandis Kota Kelurahan, Second, factors that cause guardian neglect in the management of the inheritance of minors in Kandis Kota Kelurahan.

This type of research can be classified as sociological research, because in this study the authors directly conduct research at the location or place under study. This research was conducted in the Kelurahan Kandis Kota, while the population and sample were all parties related to the problems examined in this study, data sources, used, primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study with observation , interviews and literature studies.

From the results of the research there are a number of things that can be concluded, first, the determination of guardianship based on Article 345 KHUPerdata that if one of the two parents dies, the parents who live the longest automatically become the guardian of the law for their children while what happens in this problem is the living parent the longest i.e. the mother does not become the guardian of her children. Second, the factors that cause guardian neglect in the management of the inheritance of minors based on the problems studied are due to conflicts in the family between birth mother and uncle and aunt so that the children's rights are ignored and the lack of responsibility of the guardian himself against the inheritance of minors.

Keywords: Guardianship, Minors, Responsibility

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara masalah perwalian atas seorang anak maka tidak terlepas dari pembahasan anak dan batas usia seorang anak, ini penting karena mengetahui bilamana seorang anak diletakkan di bawah perwalian dan dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatannya. Mengenai perwalian dalam KUH Perdata diatur dalam Bab XV (Pasal 330-418a) mulai dari pengertian belum dewasa sampai tentang Balai Harta Peninggalan. Disamping itu ada pula Bab XVI yang mengatur tentang beberapa perlunakan anak belum dewasa menjadi dewasa. Pasal 330 KUH Perdata mengatakan bahwa yang dikatakan “belum dewasa” adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Jika perkawinan mereka putus sebelum berumur 21 tahun maka yang telah kawin itu tidak kembali lagi menjadi belum dewasa: yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bab tersebut.¹

Ketentuan tentang Perwalian diatur dalam KUH Perdata Pasal 331 sampai dengan Pasal 344 dan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada ditangan kekuasaan orang tua. Jadi bagi anak yang orang tuanya telah bercerai atau jika salah satu dari mereka atau semua telah meninggal dunia, berada di bawah perwalian. Terhadap anak di luar kawin, maka karena tidak ada kekuasaan orang tua anak ini selalu di bawah perwalian.²

Dalam setiap perwalian, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 351 KUHPperdata dan Pasal 361 KUHPperdata hanya ada satu orang wali (Pasal 331 KUHPperdata). Jika salah satu dari kedua orang tua wafat, maka perwalian terhadap anak belum dewasa yang sudah kawin, demi hukum dipangku orang tua yang hidup terlama, kecuali di bebaskan atau dipecat

dari kekuasaan orang tua (Pasal 345 KUHPperdata). Masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau wali bagi seorang anak atau lebih, berhak mengangkat seorang wali atau lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika perwalian itu setelah wafat tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain (Pasal 335 KUHPperdata).³

Memelihara dan mendidik anak menurut kemampuannya serta mewakili semua tindakan perdata. Apabila kelakuan anak buruk, wali dapat meminta kepada hakim agar anak itu di masukkan dalam lembaga negara. Tindakan anak di wakili oleh wali, tetapi ada pengecualiannya artinya masih dapat dilakukan oleh anak itu sendiri, yaitu mengakui anak luar nikah, membuat surat wasiat, atau bertindak sebagai pemegang kuasa.⁴

Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana penyelenggara hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian dalam lingkungan Departemen Kehakiman, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jendral Hukum dan Peraturan Perundangan-undangan melalui Direktur Perdata.⁵

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Harta Peninggalan berpedoman pada Pasal 2 dan 3 keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni Nomor M. 01. PR. 07. 01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan dalam Pasal (2) tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Telah ada ketentuan hukum yang mengatur masalah perwalian, tetap saja masih ada masalah tentang perwalian. Salah satu kasus perwalian yang telah terjadi adanya seorang perempuan yang bernama Sagita Mesra Br Sihombing dan menikah dengan laki-laki yang bernama Antoni Melki Ginting yang

³ H.Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hlm. 150.

⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2016, hlm. 94.

⁵ [http://www.KeputusanMenteriKehakiman RI Nomor M. 01. PR. 07. 01-08 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peningggalan](http://www.KeputusanMenteriKehakimanRI Nomor M. 01. PR. 07. 01-08 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peningggalan), Diakses, Tanggal 25 Oktober 2015.

⁶ *Ibid*.

¹H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 149.

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 88.

beragama Kristen, dan memiliki dua orang anak laki-laki yang bernama Juan Daniel Ginting yang berumur 15 tahun dan Oby Jaya Ginting yang berumur 13 tahun dan suaminya meninggal pada tahun 21 Mei tahun 2012 dan meninggalkan harta warisan berupa :

1. Satu unit rumah yang terletak di pasar minggu jalan katolik, kandis.
2. Satu unit usaha warnet “Barcelona” yang terletak di pasar minggu, kandis.
3. Perkebunan Kelapa sawit seluas 8 HA yang terletak di jalan km. 26 dalam kelurahan pauh kecamatan Bonai Darusalam.

Setelah dua tahun kematian Antoni Melki Ginting meninggal pada tahun 2014 Sagita Mesra Br Sihombing menikah dengan laki-laki lain seorang muslim dan pindah keyakinan menjadi agama Islam.⁷ Pada saat Sagita Mesra Br Sihombing menikah lagi pihak keluarga dari Antoni Melki Ginting tidak terima dan tidak mau menyerahkan harta peninggalan Antoni Melki Ginting Kepada Sagita Mesra Br Sihombing yaitu Bulang Peni Ginting, Doni Ginting, Peni Ginting, Adi Ginting, Jupri Ginting, Kawa Ginting dan mengambil alih pengurusan harta warisan dari peninggalan Antoni Melki Ginting yang seharusnya diwariskan kepada kedua anak mereka yaitu Juan Daniel Ginting dan Oby Jaya Ginting dan Sagita Mesra Br ginting menjadi wali dari kedua anaknya dan mengurus harta peninggalan Antoni Melki Ginting yang diwariskan kepada dua anak mereka.

Sementara dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

“Apabila dari salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perwalian Pengurusan Harta Warisan Anak di bawah Umur Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus di Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Simpang Belutu Kabupaten Siak)”**.

B. Rumusan Permasalahan

1. Apakah pelaksanaan pengurusan harta warisan anak di bawah umur oleh wali sudah sesuai Hukum Perdata?
2. Apa faktor-faktor wali tidak melaksanakan pengurusan harta warisan anak di bawah umur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengurusan harta warisan anak di bawah umur menurut hukum perdata.
2. Untuk mengetahui kendala wali terhadap pengurusan harta warisan anak di bawah umur.

2) Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra (S-1) Ilmu Hukum Universitas Riau.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan ilmu yang telah penulis peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Riau.
3. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan menemukan solusi terhadap penyelesaian perwalian pengurusan harta warisan anak di bawah umur.
4. Sebagai sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Perwalian

Menurut Muhammad Amin Summa secara etimologi (bahasa), kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak awliya. Kata ini berasal dari kata arab yang berarti teman, klien, sanak, atau pelindung. Dalam literatur fiqih islam perwalian itu disebut dengan *“AL-Walayah”* (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), sedangkan al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan.⁸

Menurut KUHPperdata, ada 3 (tiga) jenis perwalian, yakni:

1. Perwalian menurut undang-undang (Pasal 345 KUHPperdata) jika salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian demi hukum, dilakukan oleh orang tua yang

⁷ Wawancara dengan Ibuk Sagita Mesra Br Ginting, masyarakat di Kelurahan Kandis Kota, tanggal 03 Maret 2019.

⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Keluarga Islam*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 134.

masih hidup terhadap anak yang belum dewasa.

2. Perwalian dengan wasiat (Pasal 355 KUHPperdata) setiap orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, berhak mengangkat seseorang wali bagi anaknya, jika perwalian itu berakhir pada waktu dia meninggal dunia atau berakhir dengan penetapan hakim.
3. Perwalian yang diangkat oleh hakim (Pasal 359 KUHPperdata) dalam hal tidak ada wali menurut undang-undang atau wali dengan wasiat, oleh hakim dapat ditetapkan/diangkat seorang wali.⁹

Pelaksanaan kewajiban wali Pasal 383 KUHPperdata dapat di simpulkan bahwa tugas wali adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan atas diri pupil (orang yang memerlukan perwalian). Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum dewasa sesuai dengan kekayaan yang belum dewasa itu sendiri.
2. Mewakili pupil dalam melakukan semua perbuatan hukum dalam bidang perdata.
3. Mengelola harta benda pupilnya sebagai bapak rumah tangga yang baik (Pasal 385 KUHPperdata).¹⁰

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, wali mempunyai kewajiban-kewajiban:

1. Kewajiban memberitahukan kepada BHP (Balai Harta Peninggalan) dengan sanksi bahwa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya, ongkos-ongkos dan bunga bila pemberitahuan tersebut tidak di laksanakan.
2. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta kekayaan pupil. Sesudah 10 hari dari permulaan perwalian harus diadakan pertelaan harta benda pupil dengan dihadiri oleh wali pengawas. Inventarisasi ini dapat dilakukan di bawah tangan, akan tetapi daftar inventarisasi harus diserahkan kepada BHP disertai pernyataan dari wali tentang kebenaran daftar dengan mengangkat sumpah di muka BHP.
3. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh pupil dan biaya-biaya pengurusan kewajiban ini tidak berlaku bagi perwalian oleh bapak atau ibu.

4. Kewajiban untuk menjual perabot-perabot rumah tangga pupil dan semua barang bergerak yang tidak memberikan buah, hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang dalam wujudnya boleh di simpan atas persetujuan BHP. Penjualan ini harus dilakukan dimuka umum oleh pegawai atau yang berhak menurut adat kebiasaan setempat. Bagi perwalian oleh bapak atau ibu di bebaskan dari penjualan tersebut.
5. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam kekayaan pupil dan surat-surat piutang negara.
6. Kewajiban untuk menanam sisa uang milik pupil setelah di kurangi biaya penghidupan dan sebagainya.¹¹

2. Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik berupa undang-undang, maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Kepastian hukum meliputi dua hal yaitu, pertama kepastian perumusan norma dan prinsip hukum yang bertentangan satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal, undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya pasal-pasal lainnya yang berada diluar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip hukum undang-undang tersebut. Jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata, berarti kepastian hukum itu tidak pernah menyentuh kepada masyarakat. Dengan kata lain, peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum

⁹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 74.

¹⁰ Komariah, *Op.cit*, hlm. 73.

¹¹ *Ibid*.

¹² Peter Mahfud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 157.

yang mati (*doodrgel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.¹³

Kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.¹⁴

Menurut Mochtar Kusumaatmadja kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural dalam interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal-usul dari mana dia berada.¹⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Perwalian adalah keadaan di mana karena orang tuanya berhalangan, maka seseorang di tunjuk untuk mengurus anak.
2. Di bawah umur untuk menggantikan pengurusan yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut baik terhadap pribadi maupun terhadap harta benda dari anak tersebut.¹⁶
3. Ahli waris adalah anggota keluarga yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karna meninggalnya ahli waris.¹⁷
4. Harta Warisan menurut hukum waris perdata adalah keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang-piutang maupun utang-utang.¹⁸
5. Anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum

¹³ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 2.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 76.

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 49.

¹⁶ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 22.

¹⁷ Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 11.

¹⁸ F.Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris (Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan)*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 7.

pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.¹⁹

6. Hukum Perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut pandang dan jenis penelitian, penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian Yuridis Sosiologis. Menurut Sutrisno Hadi penelitian Yuridis Sosiologis adalah usaha menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah untuk penelitian tersebut.²¹

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian dari pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengalami segala kehidupan atau penelitian sarana menguji serta mengembangkan ilmu pengetahuan.²²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Dengan dilakukannya suatu pertimbangan kasus terhadap perwalian melalui buku-buku referensi dan dokumen.

3. Populasi dan Sampel

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Ibu Kandung Ahli Waris	1	1	100%
2	Paman dan	6	1	50%

¹⁹ Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur (Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri)*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 63.

²⁰ Mardalena Hanifah, *Pengantar Hukum Perdata*, Alafriau, Pekanbaru, 2016, hlm. 19.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, Agustus, 2009, hlm. 30

²² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia press, Jakarta, Oktober, 1984, hlm. 252

	Bibi Ahli Waris			
3	Kepala Lurah	1	1	100%
Jumlah		8	5	-

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2019

4. Sumber Data

- Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara pengumpulan data, instrument penelitian dengan kuisisioner dan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.
- Data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara, yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan.
- Kajian pustaka yaitu, penulis mengambil, mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai kutipan dari buku, bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*. Penulis mengumpulkan data *observasi* lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai. Pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang di nyatakan responden secara tertulis atau secara lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta di tuangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perwalian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 51 dan 52 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa seorang wali adalah:²³

- Wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- Wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- Bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- Tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada di bawah penguasaannya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya.
- Mulai dan berakhirnya Hak Perwalian.

Berdasarkan Pasal 331a KUHPperdata, perwalian mulai berlaku apabila:²⁴

- Jika wali diangkat oleh hakim.
- Jika seorang wali diangkat oleh salah satu dari kedua orang tua.
- Jika seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali baik oleh hakim maupun oleh salah salah satu dari kedua orang tua.
- Jika suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga anak diangkat menjadi wali.
- Jika seseorang menjadi wali karena hukum.

Ketentuan Pasal 331 b KUHPperdata, hak perwalian berakhir apabila:²⁵

- Diangkat wali lainnya.
- Anak yang belum dewasa setelah berada di bawah perwalian, dikembalikan ke dalam kekuasaan orangtuanya.
- Anak luar kawin yang belum dewasa yang telah diakui oleh undang-undang, disahkan pada saat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan sahnya anak itu atau saat pemberian surat-surat pengesahan.

Perwalian Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perbuahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

²³ PNH. Simanjuntak, *Op.cit*, hlm. 183.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ *Ibid*, hlm. 185.

- a. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) bahwa apabila orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- b. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan (3) bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk tersebut agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan berkewajiban mengelola harta milik anak yang bersangkutan, melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 34 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kemudian dalam Pasal 35 ditentukan bahwa dalam hal anak belum mendapatkan Penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.²⁶

B. Tinjauan Umum Hukum Waris Menurut Hukum Perdata

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, dengan kata lain hanyalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Di samping itu berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.²⁷

Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi *le mort saisit le vif*, sedangkan pengalihan segala hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia kepada para ahli waris itu dinamakan *saisine*, yaitu suatu asas dimana sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala

barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.²⁸

Merupakan asas juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), adalah asas kematian artinya pewarisan hanya karena kematian (Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Demikian juga hukum kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang masih mengenal tiga asas lain, yaitu:

a. Asas Individual

Asas Individual (sistem pribadi) dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan buka kelompok klan, suku, atau keluarga. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 852 KUHPerdata.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya, asas bilateral ini dapat dilihat dari Pasal 850, 853, dan 856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bila anak-anak dan keterunannya serta suami atau istri yang meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara baik laki-laki maupun saudara perempuan.

c. Asas Penderajatan

Asas penderajatan artinya ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya maka untuk mempermudah perhitungan penggolongan-penggolongan ahli waris.²⁹

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Siak

Diawal pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak merupakan wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak, barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan

²⁶

<http://www.Mansaripayalinteung.Blogspot.Com/2012/03perwalianpengasuhan-anak-dan-peran.html?m=1>, diakses pada tanggal 17 juli 2019.

²⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960, hlm. 200.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999.³⁰

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" 00 20' 49" Lintang Selatan dan 100 54' 21" 102° 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (*growth triangle*) Indonesia-Malaysia-Singapura bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah dibagian Timur dan sebagian dataran tinggi disebelah Barat.

B. Gambaran Umum Kelurahan Kandis Kota

Terbentuknya Kelurahan Kandis Kota sebagai institusi eksekutif yang berperan menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah otonomi Kabupaten Siak, merupakan aspirasi masyarakat yang bermanfaat untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta lebih memperdekat antara pemerintah dengan rakyat yang diperintahnya.

Pada tahun 2002 tentang "Pembentukan Kecamatan Kandis, Kecamatan Lubuk Dalam, dan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak", tujuan pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat juga pemerintah dalam menjalankan hubungan administratif, serta mempermudah jangkauan pembangunan dan pemerintahan kecamatan. Dengan demikian potensi yang ada di kelurahan ini secara tidak langsung lebih terangkat dengan jangkauan pemerintah yang lebih dekat, jangkauan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan yang lama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Perwalian Pengurusan Harta Warisan Anak Di bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian perwalian adalah mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah

kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana diatur menurut undang-undang.³¹

Perwalian (*voogdij*) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah pengawasan atau pengurusan terhadap pribadi dari anak di bawah umur atau belum dewasa yang tidak di bawah kekuasaan orang tua serta pengaturan harta benda anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Batasan umur seseorang agar dianggap sebagai *meerderjarig* atau *minderjarig* tidak sama untuk setiap negara. Pasal 330 KUHPerdata yang terdiri atas tiga ayat memuat, antara lain:³²

Ayat 1 : Batas antara *minderjarigheid* dan *meerderjarigheid*, yaitu 21 tahun kecuali jika:

- Anak tersebut sudah kawin sebelum mencapai umur genap 21 tahun.
- Karena perlunakan (*handlichting* atau *venia aetatis*) Pasal 419 KUHPerdata.

Ayat 2 : Mengatakan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun, tidak berpengaruh terhadap status *meerderjarigheid* yang telah diperolehnya.

Ayat 3 : Menetapkan Bahwa mereka yang masih *minderjarig* dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa perwalian merupakan kekuasaan yang menggantikan kekuasaan orang tua terhadap anaknya dan harta kekayaannya, perwalian karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan tindakan hukum atau telah meninggal dunia.

Kategori anak yang masuk dalam lingkup perwalian adalah:

- Anak sah yang kedua orang tuanya telah meninggal salah satu atau keduanya.
- Anak sah yang kedua orang tuanya dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.
- Anak sah yang kedua orang tuanya telah bercerai.
- Anak yang lahir di luar perkawinan (*Naturlijk Kind*).

³¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (3).

³² Lia Audina, "Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Tanggung Jawab Perwalian Terhadap Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2018, hlm. 4.

³⁰ <https://siakkab.go.id/sejarah-siak/>, diakses, tanggal 26 Juli 2019.

Berdasarkan uraian di atas bahwa menurut KUHPerdota sebab-sebab anak berada di bawah perwalian karena orang tuanya telah bercerai, orang tuanya telah meninggal dunia, pencabutan kekuasaan orang tua atau karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan atau setelah perkawinan bubar baik karena perceraian, meninggal salah satu pihak atau karena pembatalan perkawinan.

Undang-Undang mengatur siapa saja yang dapat ditunjuk sebagai wali, yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup terlama *langstlevende echtgenoot* (Pasal 345 sampai 354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
2. Perwalian yang ditunjuk oleh ayah atau ibu dengan suatu testamen atau akte khusus (Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
3. Perwalian yang diangkat oleh hakim (Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa pada poin satu dalam Pasal 345 sampai dengan Pasal 354 KUHPerdota menyatakan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama sekedar tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya. Tetapi dalam Pasal ini tidak membuat pengecualian bagi suami isteri yang hidup terpisah disebabkan oleh perkawinan putus karena perceraian atau karena ada perpisahan meja dan tempat tidur, antara perwalian yang dilakukan oleh bapak atau ibu terdapat perbedaan yang prinsipil. Jadi apabila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah, ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

Pada poin dua dapat diartikan masing-masing orang tua yang melakukan perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak-anak itu bilamana sesudah dia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua lain, baik dengan sendirinya atau pun karena putusan hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 353 KUHPerdota. Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali apabila perwalian tersebut masih terbuka.

Pada poin tiga dapat diartikan bahwa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 359 KUHPerdota yang menyatakan bahwa semua anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh pengadilan. Hakim akan mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil keluarga sedarah atau semenda atau periparan.

Berdasarkan Pasal 345 KUHPerdota yang menyatakan bahwa orang tua yang hidup terlama dengan sendirinya menjadi wali. Berdasarkan KUHPerdota perwalian terhadap anak apabila salah satu orang tua meninggal dunia maka orang tua yang hidup terlama demi hukum menjadi wali dari anak-anak tersebut. Akan tetapi pada prakteknya penetapan perwalian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, masih terdapat beberapa permasalahan mengenai perwalian ini.

Mengenai permasalahan terkait penetapan perwalian dan pengurusan harta warisan dapat dilihat dari pertanyaan penulis, yaitu: bagaimana pelaksanaan perwalian dan pengurusan harta warisan di dalam keluarga dan bagaimana pengurusan harta warisan anak-anak tersebut terhadap harta warisan peninggalan ayah mereka. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Sagita Mesra Br Sihombing yang merupakan ibu kandung dari Juan Daniel Ginting dan Obi Jaya Ginting sebagai ahli waris dari harta peninggalan Antoni Melki Ginting yang merupakan ayah dari Oby Jaya Ginting dan Juan Daniel Ginting. Setelah Antoni Ginting meninggal dunia pada 21 Mei tahun 2012 dia meninggalkan harta warisan berupa:³³

1. Satu unit rumah yang terletak di pasar minggu jalan katolik, kandis.
2. Satu unit usaha warnet "Barcelona" yang terletak dipasar minggu, kandis.
3. Perkebunan Kelapa Sawit 8 HA yang terletak dijalan km 26 dalam kelurahan pauh Kecamatan Bonar Darusalam.

Setelah kematian ayah ahli waris harta warisan dikelola oleh ibu kandung ahli waris.³⁴

³³ Wawancara dengan Ibu Sagita Mesra Br Sihombing bertempat di Kelurahan Kandis Kota, pada 21 Desember 2018.

³⁴ Wawancara dengan Ibu Sagita Mesra Br Sihombing bertempat di Kelurahan Kandis Kota, pada 21 Desember 2018.

Berdasarkan beberapa pengertian perwalian menurut Hukum Perdata dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa perwalian adalah kekuasaan seseorang untuk memelihara dan mengurus diri anak yang belum dewasa termasuk juga memelihara dan mengurus harta bendanya. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Setelah dua tahun kematian ayah ahli waris yaitu Antoni Melki Ginting Ibu ahli waris yaitu Sagita Mesra Br Sihombing menikah dengan seorang laki-laki muslim dimana Ibu sagita Mesra Br Sihombing adalah seorang nasrani yang beragama Kristen Protestan, setelah menikah Ibu Sagita Mesra mengikuti agama suaminya dan berpindah keyakinan menjadi seorang Muslim. Pihak keluarga dari Antoni Melki Ginting yaitu Paman dan Bibi ahli waris yaitu Bulang Peni Ginting, Doni Ginting, Peni Ginting, Adi Ginting, Jupri Ginting dan Kawa Ginting tidak terima Ibi Sagita Mesra Br Sihombing menikah lagi dan mengambil kedudukan perwalian dan pengurusan harta warisan dari peninggalan Antoni Melki Ginting yang merupakan Ayah dari Juan Daniel Ginting dan Obi Jaya Ginting yang sebelumnya perwalian itu dilakukan oleh Ibu Sagita.³⁵ Sebagaimana yang dilakukan oleh paman dan bibi ahli waris jelas bertentangan dengan peraturan yang ada karena berdasarkan Pasal 345 KUHPperdata apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku orang tua yang hidup terlama. Apabila wali tersebut kawin lagi maka suaminya demi hukum menjadi wali peserta bersama istrinya bertanggung jawab renteng terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung.

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban diantara anggota masyarakat khususnya bidang keluarga. Soepomo menjelaskan bahwa hukum waris memuat peraturan yang mengatur proses penerusan peralihan barang berwujud dan

barang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.³⁶

Harta warisan dalam sistem hukum perdata yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam Pasal 852 KUHPperdata menyatakan bahwa anak-anak atau keturunan-keturunan sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.³⁷ Dalam hal ini setiap anak-anak atau keturunan-keturunan berhak mewarisi peninggalan harta peninggalan dari orang tuanya. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 852a KUHPperdata yang menyatakan bahwa dalam hal warisan dari seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu suami atau isteri yang ditinggal mati dalam menerapkan ketentuan-ketentuan ini disamakan dengan seorang anak sah dari orang tua yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami atau isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dari bagian terkecil yang diterima salah seorang dari anak-anak itu atau oleh semua keturunan penggantinya bila dia meninggal lebih dulu dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami tidak boleh melebihi seperempat dari harta peninggalan si pewaris.

Mengacu pada dua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila salah satu dari suami atau isteri yang meninggal lebih dulu maka dari suami atau isteri yang hidup terlama beserta anak-anak dan keturunannya yang menjadi ahli waris dari harta peninggalan tersebut kecuali bukan dari perkawinan yang kedua atau selanjutnya, berdasarkan pasal tersebut jelas paman dan bibi ahli waris bertentangan dengan aturan yang ada karna ahli waris masih hidup dan memenuhi syarat-syarat

³⁵ Wawancara dengan Ibu Sagita Mesra Br Sihombing bertempat di Kelurahan Kandis Kota, pada 21 Desember 2018.

³⁶ F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris (Cara Mudan dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visi Media, Jakarta, 2011, hlm. 2.

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

menjadi ahli waris tetapi paman dan bibi dari ahli waris mengambil harta peninggalan dari ayah ahli waris.

Wali disini bertugas sebagai pengganti orang tua dan melayani segala yang dibutuhkan oleh anak asuh bahkan menjadi wali atas anak tersebut. Kewenangan untuk menjadi wali disini sedapat mungkin memenuhi hak dan kebutuhan anak serta memberikan pelayanan kepadanya untuk kelangsungan hidup, baik tumbuh kembang anak maupun masa depan anak tersebut serta tidak lupa juga diberikan perlindungan dalam segala hal untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari agar anak dapat berintegrasi dalam masyarakat seperti anak-anak pada umumnya.³⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 383, Pasal 385, Pasal 409 KUHPerduta maka dapat dikatakan bahwa hak anak yaitu:³⁹

1. Hak atas pemeliharaan atau pengasuhan.
2. Hak atas pendidikan.
3. Hak untuk diwakili kepentingan hukumnya diluar dan di depan pengadilan.
4. Hak atau pengurusan kekayaannya.
5. Hak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap kekayaannya karena kesalahan wali.
6. Hak untuk mendapatkan seluruh harta kekayaannya jika anak berusia 21 tahun atau telah kawin.

Adapun yang merupakan kewajiban anak yang berada di bawah perwalian yaitu menghormati walinya, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 328 ayat (2) KUHPerduta.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam menjalankan tugas sebagai wali anak di bawah umur, wali mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:⁴⁰

1. Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan Pasal 368 KUHPerduta apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan wali maka dia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan harus membayar biaya-biaya atau ongkos-ongkos.

2. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta anak yang diperwalikannya (Pasal 386 ayat 1 KUHPerduta), wali harus mengadakan daftar perincian dari barang kekayaan anak dalam waktu 10 hari setelah mulainya perwalian berjalan yang harus dihadiri oleh wali pengawas (Balai Harta Peninggalan) hal tersebut diatas adalah merupakan jaminan bahwa harta kekayaan anak tersebut dapat pengurusan yang baik.
3. Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan (Pasal 335 KUHPerduta).
4. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan (Pasal 338 KUHPerduta).
5. Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga dan semua barang bergerak dan tidak bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan dengan izin (Pasal 389 KUHPerduta).
6. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang Negara jika ternyata dalam harta kekayaan *minderjarigen* ada surat piutang Negara (Pasal 392 KUHPerduta).
7. Kewajiban untuk menanam (*belegen*) sisa uang milik *minderjarigen* setelah dikurangi biaya penghidupan tersebut.

Adapun hak wali dalam melakukan tugas sebagai wali adalah, pertama hak untuk dihormati oleh anak hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 383 ayat (2) KUHPerduta. Kedua, hak untuk memperoleh upah menurut ketentuan Pasal 411 KUHPerduta apabila perwalian dilakukan bukan oleh ayah atau ibu maka wali dapat memperhitungkan upah sebesar 3% dari segala pendapatan, 2% dari segala pengeluaran atau 1 ½ % dari uang modal yang dia terima selaku pengurus harta kekayaan anak tersebut.

Selama pengurusan harta warisan peninggalan dari ayah Juan Daniel Ginting dan Obi Jaya Ginting pihak Paman dan Bibi mereka tidak melakukan kewajiban sebagai wali dan tidak memberikan hak mereka sebagai ahli waris.⁴¹ Sedangkan berdasarkan Pasal 383 KUHPerduta menyebutkan bahwa wali dalam menjalankan tugasnya diwajibkan untuk memelihara anak tersebut yang berada di

³⁸ Silvia Anggraini Setiyawati, "Kedudukan dan Tanggung Jawab Yayasan Panti Asuhan Al-Halmy Sesela Kecamatan Gunungsari Dalam Melaksanakan Hak Wali Terhadap Anak Asuh", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Mataram, Mataram, 2013, hlm. 53.

³⁹ Ishak, "Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. XI, No. 3 Agustus 2017, hlm. 582.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Sagita Mesra Br Sihombing bertempat di Kelurahan Kandis Kota, pada 21 Desember 2018.

bawah perwaliannya dan juga mengurus harta benda kepercayaan anak tersebut, selain itu wali wajib memelihara semua harta benda anak pada saat memulai jabatannya sebagai seorang wali dan juga wajib mencatat semua perubahan yang ada dari harta benda anak itu.⁴²

Merujuk pada masalah perwalian Ibu Sagita Mesra Br Sihombing sebagai ibu kandung dari Juan Daniel Ginting dan Obi Jaya Ginting seharusnya paman dan bibi mereka yang mengambil harta warisan sekaligus kedudukan wali dari ahli waris harus memenuhi kebutuhan dan keperluan dari ahli waris, dimana ahli waris masih di bawah umur dan memerlukan biaya pendidikan dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan.⁴³ Tapi pada kenyataannya paman dan bibi ahli waris tidak memberikan dan memenuhi keperluan mereka permasalahan perwalian ini jelas bertentangan dengan aturan yang ada berdasarkan Pasal 383 KUHPerdara wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak belum dewasa menurut kemampuan dan harta kekayaannya dan harus mewakili anak belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata, anak belum dewasa harus menghormati walinya.

Apabila ditinjau dari salah satu teori yang digunakan untuk menganalisa masalah ini yaitu teori kepastian hukum, yaitu dimana hukum terlaksana sesuai dengan substansi hukum yang telah disepakati oleh masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Hal ini memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan dalam hal ini yang disebut keinginan-keinginan hukum tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi inilah yang diinginkan kepastian hukum dengan adanya kepastian

hukum ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai.⁴⁴

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum (peraturan atau ketentuan hukum) mempunyai sifat sebagai berikut:⁴⁵

1. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
2. Sifat Undang-Undang yang berlaku bagi siapa saja.

Dalam prakteknya, apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan antara satu dengan yang lain adapun hal ini dikarenakan disatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Kemudian dalam prakteknya apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilanlah yang harus diutamakan, alasannya adalah bahwa keadilan pada umunya lahir dari hati nurani pemberi keadilan sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkrit. Dalam hal kasus ini dapat dikatakan adanya kepastian hukum apabila Ibu Sagita Mesra Br Sihombing tetap menjadi wali dan mengurus harta warisan peninggalan suaminya dan yang sudah dijelaskan apabila salah satu orang tuanya meninggal dunia yang mana pada peraturannya yaitu 345-354 KUHPerdara telah disebutkan bahwa perwaliannya otomatis jatuh kepada orang tua yang hidup terlama.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait perwalian dan pengurusan harta warisan anak di bawah umur seperti yang sudah dibahas menurut Pasal 345 KUHPerdara apabila salah satu orang tua meninggal dunia maka yang hidup terlama demi hukum atau otomatis menjadi wali serta mengurus harta benda anak tersebut.

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Wali Lalai Dalam Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur.

Penyebab Permasalahan yang menyebabkan wali lalai dalam pengurusan

⁴² Yulita Dwi Pratiwi, "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui penguatan Peran Wali Pengawas", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol I, No. 1 Maret 2019, hlm. 62.

⁴³ Wawancara dengan Ibu Sagita Mesra Br Sihombing bertempat di Kelurahan Kandis Kota, pada 21 Desember 2018.

⁴⁴ Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 277.

⁴⁵ *Ibid.*

harta warisan anak di bawah umur antara Ibu Sagita Mesra Br Sihombing dengan pihak paman dan bibi ahli waris yaitu, Bulang Ginting, Doni Ginting, Peni Ginting, Adi Ginting, Jupri Ginting, dan Kawa Ginting karena pada saat ayah ahli waris meninggal pihak paman dan bibi membuat surat pernyataan bahwa mereka yang mengelola harta ahli waris sampai ahli waris dewasa dan cukup umur untuk mengelola harta tersebut. Permasalahan ini terjadi sudah berlangsung lama dari tahun 2013 hingga 2019 selama itulah ahli waris tidak mendapatkan haknya dari harta peninggalan ayah ahli waris yang dikelola oleh paman dan bibinya.⁴⁶

Menurut peneliti, adapun faktor-faktor yang menyebabkan wali lalai dalam pengurusan harta warisan anak di bawah umur yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal

- a. Adanya konflik keluarga antara Ibu Kandung Ahli waris yaitu Ibu Sagita Mesra Br Sihombing dengan Paman dan Bibi Ahli waris karena pada saat setelah dua tahun kematian ayah ahli waris yaitu Antoni Melki Ginting Ibu Kandung ahli waris menikah lagi dengan laki-laki lain yang beragama Islam berpindah keyakinan dari Nasrani Menjadi Muslim yang menyebabkan pihak Paman dan Bibi ahli waris tidak terima sehingga menimbulkan konflik didalam keluarga itu.⁴⁷
- b. Setelah adanya konflik didalam keluarga itu, pihak Paman dan Bibi ahli waris membuat surat pernyataan bahwa setelah Ibu Kandung Ahli waris menikah lagi dan berpindah keyakinan bahwa pihak Paman dan Bibi lah yang mengurus harta warisan ahli waris sampai ahli waris mampu mengelola harta tersebut meningat ahli waris masih di bawah umur, tetapi Paman dan Bibi ahli waris tidak memberikan hak ahli waris berupa biaya pendidikan dan biaya kehidupan lainnya dari pengelolaan harta tersebut karna adanya

konflik antara Ibu Kandung ahli waris dengan Paman dan Bibi Ahli Waris.⁴⁸

- c. Ketidaktahuan Paman dan Bibi ahli waris mengenai tugas dan kewajiban wali itu sendiri dalam pengurusan harta warisan anak di bawah umur sehingga mereka tidak tahu padahal hal yang paling utama menjadi wali adalah menjamin kelangsungan dan kesejahteraan anak yang berada di bawah perwaliannya dan menjamin harta anak dalam pengurusan yang baik.⁴⁹
- d. Pada saat mengambil alih pengelolaan harta tersebut Paman dan Bibi ahli waris tidak mencatat atau menginventarisasi semua harta dari anak tersebut karena harta itu harus di audit secara tahunan untuk mengetahui nilai dari harta anak tersebut.⁵⁰
- e. Adanya kepentingan wali itu sendiri untuk kepentingan pribadinya menggunakan hasil pengelolaan harta warisan itu dan untuk kepentingan dirinya semata sehingga mengabaikan dan lalai memberikan dan menjalankan tugasnya sebagai wali terhadap anak di bawah perwaliannya tersebut.⁵¹
- f. Kurang adanya komunikasi yang baik antara Ibu Kandung ahli waris dengan Paman dan Bibi karena ada konflik keluarga diantara keduanya mengingat posisi ahli waris masih tinggal dengan ibu kandungnya yang menyebabkan hak anak tidak terpenuhi dan wali menjadi lalai dalam tugas dan kewajibannya.⁵²

2. Faktor Eksternal

- a. Karena kurangnya pengawasan dari wali pengawas yaitu Balai Harta Peninggalan terhadap wali yang tidak menjalankan

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Sagita Mesra Br Sihombing bertempat di Kelurahan Kandis Kota, pada 21 Desember 2018.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Wendy, Bapak Lurah Kelurahan Kandis Kota bertempat di Kantor Kelurahan Kandis Kota, pada 18 Oktober 2019.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Wendy, Bapak Lurah Kelurahan Kandis Kota bertempat di Kantor Kelurahan Kandis Kota, pada 18 Oktober 2019.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Wendy, Bapak Lurah Kelurahan Kandis Kota bertempat di Kantor Kelurahan Kandis Kota, pada 18 Oktober 2019.

⁵² Wawancara dengan Bapak Wendy, Bapak Lurah Kelurahan Kandis Kota bertempat di Kantor Kelurahan Kandis Kota, pada 18 Oktober 2019.

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Sagita Mesra Br Sihombing bertempat di Kelurahan Kandis Kota, pada 21 Desember 2018.

⁴⁷ Wawancara Dengan Ibu Peni Ginting bertempat di Kelurahan Kandis Kota, pada 13 Januari 2019.

tugasnya sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku.⁵³

- b. Karena masih adanya hubungan keluarga sehingga Ibu Kandung Ahli waris sampai saat ini belum melaporkan atau melakukan tindakan hukum kepada Paman dan Bibi yang mengambil harta warisan ahli waris.⁵⁴

Beberapa faktor-faktor di atas yang menyebabkan terjadi kelalain wali dalam pengurusan harta warisan anak di bawah umur, maka diperlukan adanya menjaga hubungan yang baik antar keluarga dan tahu bagaimana tugas dan kewajiban wali yang sebagaimana mestinya agar tidak terjadi kelalaian dalam pengurusan harta warisan anak di bawah umur sehingga kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak tersebut terjamin dan terpenuhi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perwalian Pengurusan harta warisan anak di bawah umur menurut Hukum Perdata di Kelurahan Kandis Kota yang mana pelaksanaan dan penetapan perwaliannya tidak sesuai dengan hukum perdata berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPperdata, yang mana perwalian itu diambil kedudukannya oleh paman dan bibi ahli waris sementara ibu kandung dari orang tua ahli waris yang menjadi satu-satunya orang tua yang ada masih hidup ini sudah jelas bertentangan dengan Pasal 346 KUHPperdata.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan wali lalai adalah karena adanya faktor internal dan faktor eksternal.

B. Saran

1. Menjadi penting pula memperhatikan apabila salah satu dari orangtua meninggal dunia maka orangtua yang masih hidup atau hidup terlama dan memenuhi syarat-syarat menjadi wali dari anak-anak dan keturunannya maka pihak-pihak yang seharusnya tidak menjadi wali tidak

mengambil kedudukan perwalian dari orang tua sah anak tersebut.

2. Pemerintah diharapkan seharusnya membuat aturan yang tegas mengatur tentang mekanisme pengawasan terhadap wali dan anak, serta harta anak yang berada di bawah perwalian seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Koro, Abdi, 2012, *Perlindungan Anak Di Bawah Perwalian (Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri)*, PT. Alumni, Bandung.
- Afandi, Ali, 2004, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Hasan, Djuhaendah, 1998, *Hukum Keluarga*, Armico, Bandung.
- Wicaksono, F Satriyo, 2011, *Hukum Waris (Cara Mudan dan Tepat Membagi Harta Warisan)*, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Hadikusuma, H Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Setiawan Oka, I Ketut, 2016, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Komariah, 2008, *Hukum Perdata*, UMM Pers, Malang.
- Prodjohamidjo, Martiman, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Abadi, Jakarta.
- Summa Amin, Muhammad, 2001, *Hukum Keluarga Islam Di Keluarga Islam*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Harahap, M Yahya, 2006, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta, Arief, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Fuady, Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hanifah, Mardalena, 2016, *Pengantar Hukum Perdata*, Alafariau, Pekanbaru.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Wendy, Bapak Lurah Kelurahan Kandis Kota bertempat di Kantor Kelurahan Kandis Kota, pada 18 Oktober 2019.

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Sagita Mesra Br Sihombing bertempat di Kelurahan Kandis Kota, pada 21 Desember 2018.

- Hasan, Mustofa, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung.
- Marzuki, Mahfud Peter, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Simanjutak, PNH, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Djembatan, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Prawirohamidjo, Soetojo Raden dan Pohan Marthalena, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga Universitas Press, Surabaya.
- Ramulyo dan Idris, 1996, *Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermassa, Jakarta.
- Sjarif, Ahlan Surini, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Subekti, dan Tjitrosudibio, 1960, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Prdanya Paramita, Jakarta.
- Tutik, Triwulan Titik, 2011, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Ishak, “Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol XIX, No. 3 Agustus 2017.
- Jessica A. Andrew, My Nephew’s Sanctuary:Hurdles to Guardianship of Collateral Refugee Minor in Utah. *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://1. Next,westlaw.com>. diakses pada tanggal 27 Maret 2019 di terjemahkan oleh google Translate.
- Lia Audina, “Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Tanggung Jawab Perwalian Terhadap Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2018.
- Silvia Anggraini Setiyawati, “Kedudukan dan Tanggung Jawab Yayasan Panti Asuhan Al-Halmy Sesela Kecamatan Gunungsari Dalam Melaksanakan Hak Wali Terhadap Anak Asuh”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Mataram, Mataram, 2013.
- Widya Tan Kamello, 2016, “Perwalian Terhadap Pengurusan Harta anak dibawah umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai)”, *Usu Law Jurnal*, Edisi Volume. 4, No. 3 Juni.
- Yulita Dwi Pratiwi, “Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui penguatan Peran Wali Pengawas”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol I, No. 1 Maret 2019.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Agung Maradona, “Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPerdata Dalam Proses Perwalian Anak Kandung Di Bawah Umur yang Melakukan Perbuatan Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. XI, No. 2 September 2018.
- George M. Strander, Minor Guardianship Under Mcl 700.5024 (2) (B). *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <https://1.next,westlaw.com>. diakses pada tanggal 27 Maret 2019 diterjemahkan oleh google Translate.
- H. Rusdi Malik dalam Septy Veronita, “Hak Perwalian Anak di Bawah Umur yang Beralih pada Neneknya (Analisis kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:372K/Pdt/2008)”, *Tesis*, Program PascaSarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Website

- <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>, diakses, tanggal, 13 Februari 2019.
- <http://www.Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01. PR. 07. 01-08 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peningggalan>, Diakses, Tanggal 25 Oktober 2015.
- <http://www.Mansaripayalinteung.Blogspot.Com/2012/03perwalianpengasuhan-anak-dan-peran.Html?m=1>, diakses pada tanggal 17 juli 2019.